



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima perlu dilakukan pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa untuk mewujudkan zona integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perlu dibentuk tim kerja pembangunan dan

evaluasi zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN																
	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	1. Pembentukan Tim Zona Integritas yang ditetapkan dengan Keputusan.	Terbitnya SK Tim Zona Integritas di KPU Kabupaten Pasuruan.														
		2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan Zona Integritas.	Adanya kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Zona Integritas di KPU Kabupaten Pasuruan.														
	2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas melalui Rapat Pleno yang ditetapkan dengan Keputusan.	Penetapan Rencana Kerja ZI dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan.														
		2. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui website dan sosmed KPU Kabupaten Pasuruan kepada pihak internal dan eksternal.	Sosialisasi dan publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui berbagai media sosialisasi KPU Kabupaten Pasuruan.														
	3. Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas	Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala (minimal 6 bulan sekali).	Adanya Laporan Monev ZI secara berkala dan tindak lanjutnya.														

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Internalisasi budaya kerja kepada semua pegawai dan pimpinan dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM.	Adanya keterlibatan seluruh pegawai dan pimpinan dalam kegiatan ZI serta pembuatan tagline, banner/poster tentang Penegakan Integritas dan budaya kerja ASN.													
		2. Pembentukan Agen Perubahan.	Terbitnya SK Agen Perubahan.													
II. PENATAAN TATALAKSANA																
	1. Penyusunan Prosedur Operasional(SOP)	1. Penyusunan SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.	Sosialisasi SOP yang telah ditetapkan.													
		2. Penerapan SOP yang telah ditetapkan.	SOP telah diterapkan oleh masing-masing unit organisasi.													
		3. Evaluasi terhadap SOP yang diterapkan.	Adanya evaluasi atas penerapan SOP dan tindak lanjut atas usulan perbaikan SOP.													
	2. Penerapan e-office	1. Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi	Pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi (e-lapkin).													
		2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Unit menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.													
		3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.													
		4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	laporan penggunaan teknologi informasi dalam operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala.													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.	Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap.													
		2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.	Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti.													
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM																
	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.	1. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada dokumen peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.													
		2. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.	Adanya kesesuaian antara penempatan pegawai hasil rekrutmen (seleksi CPNS) dengan usulan kebutuhan pegawai ke KPU RI.													
	2. Pola Mutasi Internal	3. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Adanya Laporan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.													
		1. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan.	Adanya mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.													
		2. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan pola rotasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			mutasi yang telah ditetapkan organisasi.													
		3. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Adanya laporan monev terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.													
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Adanya keikutsertaan Pegawai di Unit Kerja untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.														
	2. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala.														
4. Penetapan kinerja individu	1. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi.	Adanya kesesuaian antara penetapan kinerja individu dengan kinerja organisasi dan perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).														
	2. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Adanya Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan.														
	3. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk penilaian Pegawai Berprestasi.														
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik	Implementasi/pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.	Adanya laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku.														

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.	Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai.													
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS																
	1. Keterlibatan pimpinan	Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti													
	2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil.	Adanya dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.													
		2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.	Adanya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.													
		3. Penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu.	Adanya laporan kinerja yang disusun tepat waktu.													
		4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (mengikuti sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll)													
V. PENGUATAN PENGAWASAN																
	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Mengadakan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi.	Adanya sosialisasi melalui medsos serta media informasi lainnya tentang kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi.													
		2. Implementasi pengendalian gratifikasi.	Adanya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan laporan semester													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2. Penerapan SPIP	1. Membangun lingkungan pengendalian.	Terlaksananya pengendalian yang dibuktikan dengan penyampaian LHKPN/LHKASN serta penyusunan Rencana Pengendalian atas resiko kegiatan.													
		2. Penyusunan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	Adanya peta resiko, penilaian resiko tingkat entitas dan tingkat kegiatan yang dituangkan dalam laporan SPIP tahunan.													
	3. Pengaduan Masyarakat	3. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Adanya internalisasi tentang keberadaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.													
		1. Implementasi kebijakan Pengaduan masyarakat.	Adanya kotak pengaduan, SOP Dumas, tampilan Dumas pada website KPU Kabupaten Pasuruan dan Lapor.go.id													
		2. Penanganan pengaduan masyarakat (yang harus ditindaklanjuti, sedang diproses, dan yang selesai ditindaklanjuti)	Tersusunnya daftar dan tanggapan masyarakat atas dumas KPU Kabupaten Pasuruan.													
		3. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat.	Adanya laporan Dumas dan tindak lanjutnya.													
	4. Whistle-Blowing System	Internalisasi dan penerapan <i>Whistle-Blowing System</i>	Sosialisasi penerapan <i>whistle blowing system</i> di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.													
	5. Penanganan Benturan Kepentingan	Internalisasi dan penerapan Penanganan benturan kepentingan.	Sosialisasi penerapan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																
	1. Standar Pelayanan	1. Penyusunan kebijakan dan maklumat standar pelayanan.	Adanya website e-PPID, Maklumat PPID, Desk Pelayanan PPIP, Dokumen dan Peraturan terkait PPID.													
		2. Penyusunan SOP pelaksanaan standar pelayanan.	Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP e-PPID, SOP Permohonan Informasi Publik.													
		3. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Adanya laporan review SOP dan Perubahan SOP.													
	2. Budaya Pelayanan Prima	1. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.	Adanya kegiatan rapat/sosialisasi pelatihan pelayanan prima.													
		2. Penyamapian informasi tentang pelayanan agar mudah diakses melalui berbagai media	Adanya penyampaian prosedur pelayanan melalui website dan sosmed KPU Kabupaten Pasuruan.													
		3. Penerapan sistem punishment/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Adanya kegiatan rapat evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.													
	3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	1. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Adanya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala													
		2. Penyampaian hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, dsb)													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.	Adanya laporan hasil survey dan tindak lanjutnya													

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

